



**RENCANA KERJA
KECAMATAN JATILAWANG TAHUN
2022
(RENJA)**



**KECAMATAN JATILAWANG
2022**

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2021 ini menyusun Rencana Kerja Kecamatan Jatilawang (Renja Kecamatan Jatilawang) Kabupaten Banyumas Tahun 2022. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai

dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 2 yang berbunyi Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas :

- a. RPJPD;
- b. RPJMD ;
- c. Renstra SKPD;
- d. RKPD; dan
- e. RENJA SKPD

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jatilawang Tahun 2022, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kecamatan Jatilawang yang merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jatilawang tahun 2018-2023 yaitu :

“Manjadikan Banyumas yang Maju, Adil, Makmur dan Mandiri”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Kecamatan Jatilawang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik ;
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan Kesehatan ;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas , berkeadilan dan berkelanjutan ;
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata dan industri kreatifitas berbasis sumber daya lokal ;

5. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor kedaulatan pangan ;
6. Menciptakan Iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan ;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas insfraktuktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan ;
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius .

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatilawang tahun 2022, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Jatilawang Tahun 2022 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jatilawang tahun 2021 adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

- Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2013 ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Jatilawang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022.

Sedangkan tujuan :

1. Sebagian acuan Kecamatan Jatilawang dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Jatilawang selama tahun 2022.

I.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah

terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals). Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang startegis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, berdasar Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka akan di dapatkan analisis kebutuhan Rencana Kerja Tahun 2022.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.2 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun

seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Jatilawang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Jatilawang. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jatilawang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Jatilawang selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2022. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan target kinerja Kecamatan Jatilawang tahun 2021 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021. Jumlah anggaran belanja pada APBD Induk Tahun 2021 sebesar Rp 2.855.124.950,00 terdiri dari belanja operasional Rp 2.790.990.950,00 dan belanja modal Rp 64.134.000,00. Dalam pelaksanaannya terjadi refocusing anggaran dampak pandemi covid 19 menjadi Rp 2.394.886.576,00 dengan belanja operasional Rp 2.364.437.276,00 dan belanja modal Rp 30.449.576,00. Penyerapan anggaran belanja operasional Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 2.268.823.905,00 (95,90%) dari total anggaran belanja modal sebesar Rp 27.900.000,00 (91,63%).

Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas pada tahun anggaran 2021 telah melaksanakan seluruh program yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu terdiri dari 5 program dan 10 kegiatan. Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas direpresentasikan oleh capaian indikator kinerja. Rekapitulasi evaluasi hasil kinerja tahun lalu dapat dilihat dalam table T-C.29 sebagai berikut :

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kecamatan Jatilawang**

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun		Realisasi capaian kinerja Renstra		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	Permasalahan	Keterangan				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	DPA INDIUK		DPA PERUBAHAN		1		2		3								4			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp
3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16	17				
[TUJUAN] Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima																												
[INDTUJUAN]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan		86			84		84		84		84		84		84		84		84		100			0			
[SASARAN] Meningkatkan peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat																												

[INDSASARAN]	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100						
[PROGRAM] X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2.290.655.436		2.290.655.436		2.290.655.436		427.130.655		677.278.043		498.965.800		594.871.707		2.198.246.205		95.97						
[INDPROGRAM]	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		
[INDPROGRAM]	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		
[INDPROGRAM]	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		
[INDPROGRAM]	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		
[KEGIATAN] X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							2.118.000		2.118.000		2.118.000						307.600				307.600		14.52						
[INDKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Dokumen	10		4		4		4		4		1		0		3		0		4		100		8		80		

[SUBKEGIA TAN] X.XX.01.2.02 .02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							32.195. 000		32.195. 000		32.195. 000			8.800. 000		10.80 0.000		8.630. 000		28.230. 000		87. 68						
[INDSUBKE GIATAN]	Jumlah pengelola keuangan SKPD	Oran g	6		6		6		6		6		6		6		6		6		100		6		100			
[KEGIATAN I] X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah							103.19 8.243		103.19 8.243		103.19 8.243			8.664. 000		6.097. 800		14.40 8.500		29.170. 300		28. 27						
[INDKEGIA TAN]	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6		6		6		6		6		6		6		6		6		100		6		100			
[SUBKEGIA TAN] X.XX.01.2.06 .01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor							5.802.0 00		5.802.0 00		5.802.0 00			669.0 00		560.5 00		1.086. 500		2.316.0 00		39. 92						
[INDSUBKE GIATAN]	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	1		1		1		1		1		1		1		1		1		100		1		100			
[SUBKEGIA TAN] X.XX.01.2.06 .02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor							33.419. 543		33.419. 543		33.419. 543			3.352. 000		2.056. 000		3.414. 000		8.822.0 00		26. 4						
[INDSUBKE GIATAN]	Jumlah peralatan dan perlengkap an kantor yang tersedia	Jenis	4		4		4		4		4		4		4		4		4		100		4		100			

[SUBKEGIA TAN] X.XX.01.2.06 .03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							9.400.0 00		9.400.0 00		9.400.0 00			853.0 00		718.5 00		890.0 00		2.461.5 00		26. 19						
[INDSUBKE GIATAN]	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	3		3		3		3		3		3		3		3		3		100		3		100			
[SUBKEGIA TAN] X.XX.01.2.06 .04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor							29.799. 800		29.799. 800		29.799. 800			3.790. 000		2.080. 000		8.380. 000		14.250. 000		47. 82						
[INDSUBKE GIATAN]	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bula n	36		12		12		12		12		3		3		3		12		100		24		66.67			
[SUBKEGIA TAN] X.XX.01.2.06 .05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							5.286.9 00		5.286.9 00		5.286.9 00					682.8 00		638.0 00		1.320.8 00		24. 98						
[INDSUBKE GIATAN]	Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	24		8		8		8		8		2		4		5		8		100		8		33.33			
[INDSUBKE GIATAN]	Jumlah pengganda an yang tersedia	lbr	33 69 3		839 3		1162 3		116 23		11623		43 2		44 65		31 25		37 1		8393		72.21		167 86		49.82	Banyak kegiatan yang tidak dilaksana kan karena pandemi
[SUBKEGIA TAN] X.XX.01.2.06 .09 Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							19.490. 000		19.490. 000		19.490. 000											0						
[INDSUBKE GIATAN]	Jumlah Koordinasi/ Konsultasi dan Pertemuan	Kali	6		1		2		2		2		0		0		0		1		1		50		2		33.33	Refocusi ng karena adanya pandemi

[KEGIATAN] X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							78.600. 000		78.600. 000		78.600. 000			11.44 5.000		9.651. 000		21.72 2.727		42.818. 727		54. 48							
[INDKEGIA TAN]	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	5		5		5		5		5		5		5		5		5		100		5		100				
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							58.600. 000		58.600. 000		58.600. 000			8.125. 000		8.691. 000		17.68 7.727		34.503. 727		58. 88							
[INDSUBKE GIATAN]	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	10		10		10		10		4		8		9		10		10		100		10		100				
[SUBKEGIA TAN] X.XX.01.2.09 .06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							20.000. 000		20.000. 000		20.000. 000			3.320. 000		960.0 00		4.035. 000		8.315.0 00		41. 58							
[INDSUBKE GIATAN]	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	60		16		20		20		20		3		6		5		2		16		80		32		53.33		Peralatan sebagian masih dalam kondisi baik dan hanya memerlukan service ringan
[INDSUBKE GIATAN]	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	5		5		5		5		5		5		5		5		5		100		5		100				
[PROGRAM] PROGRAM PENYELEN GGARAAN							16.300. 000		16.300. 000		16.300. 000			611.0 00		833.6 00		13.91 4.600		15.359. 200		94. 23							

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Desa/kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar	Desa	11		11		11		11		0		11		11		11		11		100		11		100						
[PROGRAM] PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						42.331.140		42.331.140		42.331.140			7.758.400		12.359.700		19.907.400		40.025.500		94.55										
[INDPROGRAM]	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100						
[KEGIATAN] Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						42.331.140		42.331.140		42.331.140			7.758.400		12.359.700		11.053.000		31.171.100		73.64										
[INDKEGIATAN]	Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Desa	11		11		11		11		11		11		11		11		11		100		11		100						
[SUBKEGIATAN] Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						7.800.000		7.800.000		7.800.000			2.833.400		1.638.900		900.000		5.372.300		68.88										
[INDSUBKEGIATAN]	jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Orang	330		330		330		330		0		0		330		0		330		100		660		200						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Persentase realisasi keuangan program	%	100	83	100	92,07	92,07	100	275,07	68,77
	Persentase realisasi fisik program	%	100	66	100	95,98	95,98	100	261,98	65,50
<u>Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah</u>	Jasa Langganan Surat Kabar, Telepon, Internet, Listrik dan Air yang Dibayar	Bulan	60	12	12	12	100	12	36	92,75
<u>Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah</u>	Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya yang tersedia	Buah	225	156	210		84,29	215	371	92,75
	Makan Minum Harian Pegawai, Rapat dan Jamuan Tamu yang tersedia	Bulan	60	12	12	12	100	12	36	9,00
	Alat Listrik dan Elektronik yang tersedia	Jenis	3	8	3	3	100	3	14	3,50
	Cetak dan penggandaan yang tersedia	Lembar	15600	15040	15100		96,69	15225	41266	122
	Alat tulis kantor yang tersedia	Jenis	50	12	50	50	100	3	65	1,30
<u>Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah</u>	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	Bulan	12	12	12	12	100	12	36	3,00
<u>Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah</u>	Perjalanan Dinas untuk rapat, koordinasi dan konsultasi	Bulan	60	12	12	12	100	12	36	0,60

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<u>Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah</u>	Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah yang tersedia	Jenis	4	12	4	4	100	4	20	5,00
<u>Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah</u>	Peralatan dan Perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	Bulan	12	12	12	12	100	12	36	3,00
<u>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah</u>	Gedung Pemerintah Dalam kondisi Baik	Bulan	12	1	12	12	100	12	25	2,08
<u>Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah</u>	Kendaraan Bermotor Roda 4 dalam keadaan baik	Unit	2	2	2	2	100	6	10	5,00
	Kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	Unit	6	6	9	9	100	2	17	2,83
	Kendaraan bermotor non roda 2 dan roda 4	Unit	1	1	1	1	100	1	3	3,00
<u>Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah</u>	Honor Pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang Dibayarkan	Bulan	12	11	12	12	100	12	35	2,92
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Keseuain Program antar Dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	300	3,00
	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	300	3,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<u>Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen	1	34	5	5	100	5	44	44,00
	Kegiatan rapat kerja perencanaan, Pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan	Kali	20	4	4	4	100	4	12	0,60
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemohon administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	100	100	100	100	100	300	3,00
	Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%	100	100	100	100	100	100	300	3,00
	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelola APBDES/ADK	%	100	100	100	100	100	100	300	3,00
	Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%	90	80	90	96,67	96,67	95	271,67	3,02
	Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	95	75	100	100	100	100	275	2,89
	Persentase linmas terbina	%	80	70	100	100	100	90	260	3,25
<u>Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan</u>	Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan yang terfasilitasi	%	100	25	100	100	100	100	225	2,25
	Pemohon PATEN yang terlayani	%	100	100	100	100	100	100	300	3,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<u>Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Desa/Kelurahan</u>	Frekuensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan desa/kelurahan	Kali	20	4	4	4	100	4	12	0,60
	Pelaksanaan Musrenbang di desa/kelurahan dan kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	300	3,00
	Kegiatan Pembinaan serta pengawasan pengelolaan Dana Desa/Dana Kelurahan yang terfasilitasi	Kali	5	4	1	1	100	1	6	1,20
	Kegiatan perencanaan dan pembangunan desa/kelurahan yang terfasilitasi	Kali	5	3	1	1	100	1	5	1,00
<u>Fasilitasi Intensifikasi PBB</u>	Presentase PBB yang dapat terbayar	%	100	79	92	96,57	96,57	93	268,57	2,69
<u>Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan</u>	Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat dan penganggulan kemiskinan	Kali	40	24	40	40	100	8	72	1,80
<u>Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban dan Ketertiban Kecamatan</u>	Penanganan gangguan trantibum yang dilaksanakan sesuai SOP	%	100	3	100	0	0	100	103	1,03
	Persentase Gangguan Ketentraman dan ketertiban kecamatan yang tertangani	%	100	30	100	100	100	100	230	2,30
	Pelaksanaan Rakor Linmas	Kali	4	4	4	4	100	4	12	3,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pembinaan kepada linmas	Kali	20	10	4	4	100	4	18	0,90
Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan APBDes Kecamatan Jatilawang	Frekuensi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan APBDes	Kali	20	12	4	4	100	4	20	1,00
	Frekuensi Pembinaan dan Pengawasan APBDes	Kali	10	10	2	2	100	2	14	1,40
	Persentase Desa yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan APBDes	%	100	25	100	100	100	100	225	2,25

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijakan di bidang Pemerintahan, Pelayanan dan Perijinan, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban serta kelurahan;
2. Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang Pemerintahan, Pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
3. Melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
4. Melaksanakan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
6. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
7. Melaksanakan fungsi kesekretariatan kecamatan;
8. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Camat yang membawahi;
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Unsur Pelaksana, yang terdiri dari:
 1. Seksi Pemerintahan Desa
 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 4. Seksi Pelayanan;
 5. Seksi Ekonomi Pembangunan

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2021

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran Belanja Langsung tahun 2021 dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 725.496.850,- terurai dalam 5 program dan 10 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2020, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

No	Indikator	Target	Realisasi		Capaian (%)	Kenaikan / Penurunan
			2020	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	100	100	100	100	-
2	Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	100	100	100	100	-
3	Persentase pembayaran PBB di kecamatan	95	87	80	96,67	7
4	Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	100	95	75	100	20
5	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	100	100	90	100	10
6	Persentase realisasi keuangan program	100	100	100	100	100
7	Persentase realisasi fisik program	100	92,07	83	92,07	9.07

8	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	100	95,98	66	95,98	29,98
9	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	100	100	100	100	100

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan JATILAWANG
Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Banyumas

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IK K	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catat an Anali sis
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (tnn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n- 1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (tnn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan			86	83	84	85	83	83	86	86	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

1. Kurangnya pemberdayaan lembaga masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah kota;
2. Belum optimalnya partisipasi kelembagaan masyarakat terhadap program KB.
3. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTH;
4. Belum pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak di tingkat kecamatan dan Desa;
5. Belum optimalnya kualitas kader potensi sumber kesejahteraan sosial ditingkat kelurahan dan kecamatan.

6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya daerah.
7. Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan dan desa.
8. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan dan desa.
9. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;
10. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat
11. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2021 dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jatilawang sesuai tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten di bidang TIK dan Kehumasan serta Kerumahtanggaan;
2. Akses informasi yang belum merata dan kurang optimalnya sarana komunikasi yang ada dalam penyelenggaraan diseminasi informasi;
3. Ketersediaan jaringan internet dan intranet masih kurang;
4. Belum adanya integrasi data dan sistem informasi antar perangkat daerah;
5. Data Aset dan Barang Daerah Milik Kecamatan masih belum lengkap;
6. Kurangnya staf permas karena beban kerja kasi permas yang tinggi
7. Terkait dengan Tusi PKK masih belum optimal karena belum adanya staf teknis yang mengurus hal tersebut;
8. Banyaknya permasalahan mengenai pemberdayaan masyarakat di wilayah desa yang harus di follow up namun keterbatasan tenaga menjadi tidak bisa tercover semuanya;
9. Belum sinerginya perangkat desa yang membidang permas dan kesra dengan seksi permas;
10. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan;

11. Kurang optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan pelayanan ditingkat kecamatan;
12. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan;
13. Masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui syarat-syarat mengurus administrasi kependudukan;
14. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;
15. Belum adanya sinkronisasi dalam aplikasi sistem data kependudukan antara kecamatan dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
16. Sinergitas dengan Pendamping Desa perlu ditingkatkan;
17. Belum optimalnya Ruang Konsul Pemerintahan Pelayanan;
18. Kurangnya staf yang menguasai pemerintahan;
19. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan ke Desa;
20. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional linmas dalam menjalankan tugas (kendaraan patroli, pos satlinmas);
21. Kurangnya jumlah anggota linmas kecamatan dan kurangnya kemampuan ketrampilan Satlinmas dalam mendukung tugas dan fungsi;
22. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat;
23. Info kegiatan terkait kecamatan belum optimal;
24. Personel yang harus keliling;
25. Masih kurangnya SDM yang berkualitas sehingga pekerjaan masih sering terhambat;
26. Masih adanya personil yang belum bekerja sesuai dengan Tugasnya;
27. Masih rendahnya kualitas SDM dibidang pengelolaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kecamatan Jatilawang menghadapi berbagai tantangan dan hambatan serta dukungan baik secara internal maupun eksternal yang dapat dianalisis dengan menggunakan SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Treatment). Analisis SWOT juga merupakan alat analisis untuk menyusun isu-isu strategis yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dan hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jatilawang Untuk lebih jelasnya hasil analisis SWOT sebagai berikut:

A. Strength (Kekuatan)

1. Faktor kekuatan yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan publik.
2. SDM SKPD Kecamatan Jatilawang didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 13 orang yang terdiri dari : pendidikan S-2 sebanyak 2 orang, S-1 sebanyak 6 orang, pendidikan SMA sebanyak 6 orang , pendidikan SMP sebanyak 1 orang. Dilihat dari pendidikan regular, pegawai Kecamatan Jatilawang sudah cukup baik dan hal tersebut merupakan modal dasar dalam urusan pemerintahan daerah.
3. Sarana dan Prasarana
Dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Jatilawang sudah cukup memadai, baik asset yang bergerak maupun tidak bergerak.
4. Adanya tupoksi yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018. Tupoksi yang jelas merupakan modal dasar yang sangat penting, dan memberikan kekuatan yang jelas didalam melaksanakan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah.

B. Weakness (Kelemahan)

Disamping kekuatan yang dimiliki didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi teknis operasional urusan pemerintahan daerah , kecamatan Jatilawang juga memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

1. Kurangnya jumlah ASN dan masih belum banyak yang menguasai IT
2. Masih kurangnya disiplin ASN
3. Masih sering terjadi tumpang tindih tupoksi
4. Kebersihan Kantor perlu ditingkatkan

C. Opportunity (Peluang)

Dari analisis strength dan weakness, perlunya menganalisis peluang-peluang yang dapat diciptakan dalam mendukung perencanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di. Peluang-peluang tersebut adalah :

1. Pemberian beasiswa dari Pemda Banyumas untuk meningkatkan jenjang pendidikan.
2. Tersedianya anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
3. Adanya kemauan dan keinginan dari karyawan dan karyawan untuk meningkatkan kemampuan.
4. Adanya kerjasama dengan Desa atau pihak lain untuk menyediakan data yang dibutuhkan.
5. Adanya keinginan untuk menyusun perencanaan yang baik dari berbagai pihak.
6. Adanya dukungan dari masyarakat dan legislatif
7. Adanya kebutuhan dan tuntutan akan pembangunan yang jelas dan terarah.
8. Semakin banyak pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat
9. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
10. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada kecamatan yang lebih besar
11. Kemajuan perkembangan teknologi dan informasi yang cepat.

D. *Treatment* (Ancaman)

Dalam melaksanakan tupoksinya SKPD Kecamatan Jatilawang tidak lepas dari adanya ancaman yang akan mempengaruhi terhadap proses teknis operasional urusan pemerintahan daerah. Ancaman yang mungkin akan terjadi antara lain:

1. Adanya tuntutan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.
2. Adanya aturan-aturan yang menghambat pengembangan karier pegawai.
3. Adanya bencana alam yang sering terjadi di Banyumas (tanah longsor, banjir, angin puting beliung).
4. Kurangnya etos kerja
5. Tingginya tingkat pengangguran
6. Tingginya jumlah penduduk miskin
7. Tingginya ancaman bencana
8. Rendahnya semangat kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat.

Berdasarkan analisa SWOT diatas dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Organisasi Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Kecamatan Jatilawang yang membantu Bupati Banyumas dalam Perencanaan Pembangunan Daerah bidang pelayanan publik, sehingga semakin professional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah bidang administrasi pemerintahan di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

1. Tersedianya sarana/ prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi pemerintahan
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan di bidang administrasi pemerintahan antara lain: DPRD,

LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta.

4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan di kecamatan
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Jatilawang dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat Desa dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurangnya optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan;
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/ tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Tugas Kecamatan Jatilawang

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijakan di bidang Pemerintahan, Pelayanan, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban
2. Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang Pemerintahan, Pelayanan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban
3. Melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban
4. Melaksanakan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban
5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban;
6. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
7. Melaksanakan fungsi kesekretariatan kecamatan;
8. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Isu-isu penting untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jatilawang pada tahun 2021 adalah:

1. Kurangnya pemberdayaan lembaga masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah kota;
2. Belum optimalnya partisipasi kelembagaan masyarakat program KB.
3. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTH;

4. Belum pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan terhadap anak di tingkat kecamatan dan kelurahan;
5. Belum optimalnya kualitas kader potensi sumber kesejahteraan sosial ditingkat kelurahan dan kecamatan.
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya daerah.
7. Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan dan desa.
8. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan dan desa.
9. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;
10. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat
11. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi Kecamatan maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Jatilawang tahun 2018 – 2023, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Jatilawang pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut di atas, strategi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan prima melalui pemenuhan, penerapan SOP dan PATEN.
2. Peningkatan keterlibatan organisasi pemuda dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Peningkatan Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Masyarakat maupun Aparat Keamanan dan Ketertiban dalam Mengantisipasi berbagai Ancaman dalam Ketetraman, Ketertiban dan Kebencanaan
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.
5. Memberdayakan dan Membina Kader PKK untuk Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan di Desa
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)

7. Melakukan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping Desa utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasan APBDes
8. Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender dan Anak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan.
9. Mewujudkan ASN yang cakap teknologi informasi khususnya terkait aplikasi yang berhubungan dengan e-Office

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana, Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Menuju Pelayanan Prima sesuai Tuntutan Masyarakat;
2. Peningkatan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan tingkat kecamatan dan Desa;
3. Peningkatan Pembinaan Linmas di Kecamatan dan Desa;
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan dan Desa dalam Perencanaan Pembangunan, dan Fasilitas Perencanaan Pembangunan melalui Musrenbang;
5. Peningkatan Pemberdayaan dan Pembinaan Posyandu, Lembaga dan Organisasi Masyarakat;
6. Pembersihan Sampah Liar dan Fasilitasi kebersihan lingkungan dengan mengadakan even- even lintas sektoral dalam menjaga lingkungan hidup;
7. Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping Desa utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasan APBDes;
8. Fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan anak;
9. Pengiriman ASN ke berbagai Diklat maupun pelatihan yang terkait Aplikasi dalam Subbag Umum dan kepegawaian maupun Perencanaan dan Keuangan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal RKPD Kecamatan Jatilawang telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Jatilawang Tahun 2018-2023 guna dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen Rancangan

Renja memuat informasi tentang rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan Awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/ tolok ukur dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/ kegiatan yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jatilawang dan Identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan pembiayaan penerimaan daerah berikut pendanaan indikatif.

TabelT-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kabupaten Banyumas

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No.	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Lokasi	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Lokasi	Pagu Indikatif
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Kec. Jatilawang	2.786.865.400	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kec. Jatilawang	2.786.865.400
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	100%	Kec. Jatilawang	5.014.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	5 Dokumen	Kec. Jatilawang	5.014.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	100%	Kec. Jatilawang	2.507.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	2 Dokumen	Kec. Jatilawang	2.507.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan	100%	Kec. Jatilawang	2.507.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan	2 Dokumen	Kec. Jatilawang	2.507.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	100%	Kec. Jatilawang	2.137.158.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	12 Jenis	Kec. Jatilawang	2.137.158.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	100%	Kec. Jatilawang	2.104.758.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	16. Orang	Kec. Jatilawang	2.104.758.000

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan SKPD	100%	Kec. Jatilawang	32.400.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan SKPD	12 Orang	Kec. Jatilawang	32.400.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	100%	Kec. Jatilawang	156.299.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	5 Jenis	Kec. Jatilawang	156.299.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	100%	Kec. Jatilawang	5.012.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	5 Jenis	Kec. Jatilawang	5.012.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100%	Kec. Jatilawang	36.386.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 Jenis	Kec. Jatilawang	36.386.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	100%	Kec. Jatilawang	8.028.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	3 Jenis	Kec. Jatilawang	8.028.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	100%	Kec. Jatilawang	17.924.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	2 Bulan	Kec. Jatilawang	17.924.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan yang tersedia	100%	Kec. Jatilawang	6.309.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan yang tersedia	2 Buah	Kec. Jatilawang	6.309.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	100%	Kec. Jatilawang	82.640.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	2 Kali	Kec. Jatilawang	82.640.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	100%	Kec. Jatilawang	82.894.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	2 Unit	Kec. Jatilawang	85.894.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	100%	Kec. Jatilawang	42.746.000	Pengadaan Mebel	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	5 Unit	Kec. Jatilawang	42.746.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	100%	Kec. Jatilawang	14.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	3 Jenis	Kec. Jatilawang	14.000.000

	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Tersedia	100 %	Kec. Jatilawang	29.148.000	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Tersedia	5 Unit	Kec. Jatilawang	29.148.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	100%	Kec. Jatilawang	294.825.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	4 Jenis	Kec. Jatilawang	294.825.400
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	100%	Kec. Jatilawang	40.747.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	5 Bulan	Kec. Jatilawang	40.747.000
	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	100%	Kec. Jatilawang	6.750.000	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	27 Jenis	Kec. Jatilawang	6.750.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai non ASN	100%	Kec. Jatilawang	247.328.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai non ASN	10 Orang	Kec. Jatilawang	247.328.400
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang/gedung milik daerah yang dilaksanakan	100%	Kec. Jatilawang	107.675.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang/gedung milik daerah yang dilaksanakan	20 Jenis	Kec. Jatilawang	107.675.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional SKPD yang dipelihara	100%	Kec. Jatilawang	77.600.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional SKPD yang dipelihara	10 Unit	Kec. Jatilawang	77.600.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	100%	Kec. Jatilawang	19.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	5 Unit	Kec. Jatilawang	19.500.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung pemkab yang terpelihara	100%	Kec. Jatilawang	10.575.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung pemkab yang terpelihara	5 Unit	Kec. Jatilawang	10.575.000

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100%	Kec. Jatilawang	17.544.600	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100 %	Kec. Jatilawang	17.544.600
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Jenis Pelayanan di Kecamatan Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1%00	Kec. Jatilawang	17.544.600	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah desa yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar	1 Jenis 2 Kegiatan	Kec. Jatilawang	17.544.600
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	pemohon pelayanan di Kecamatan yang terlayani	100%	Kec. Jatilawang	10.035.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	pemohon pelayanan di Kecamatan yang terlayani	7.600 Orang	Kec. Jatilawang	10.035.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Desa/kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar	100%	Kec. Jatilawang	7.509.600	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Desa/kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar	11 Desa	Kec. Jatilawang	7.509.600
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	Kec. Jatilawang	46.300.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	11 Desa	Kec. Jatilawang	46.300.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	Kec. Jatilawang	46.300.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	11 Desa	Kec. Jatilawang	46.300.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	Kec. Jatilawang	8.028.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 Orang	Kec. Jatilawang	8.028.000

	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat	100%	Kec. Jatilawang	23.082.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat	150 Kali	Kec. Jatilawang	23.082.000
	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	100 %	Kec. Jatilawang	15.190.000	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	100 Kegiatan	KEC. Jatilawang	15.190.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	Kec. Jatilawang	7.125.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	1 Kegiatan	Kec. Jatilawang	7.125.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	Kec. Jatilawang	7.125.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Kegiatan	Kec. Jatilawang	7.125.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah unsur yang bersinergi dalam upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100 %	Kec. Jatilawang	7.125.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah unsur yang bersinergi dalam upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	3 Unsur	Kec. Jatilawang	7.125.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	100%	Kec. Jatilawang	7.526.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	11 Desa	Kec. Jatilawang	7.526.000

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	100%	Kec. Jatilawang	7.526.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	11 Desa	Kec. Jatilawang	7.526.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Frekuensi pembinaan dan pengawasan APBDes	100%	Kec. Jatilawang	7.526.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Frekuensi pembinaan dan pengawasan APBDes	3 Kali	Kec. Jatilawang	7.526.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Frekuensi fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa		Kec. Jatilawang	-	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Frekuensi fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	-	Kec. Jatilawang		
JUMLAH					2.865.361.000	JUMLAH					2.865.361.000

22.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kecamatan Jatilawang akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, para pelaku pariwisata, kalangan seniman, perguruan tinggi yang langsung ditujukan kepada Kecamatan Jatilawang maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat biasanya berkaitan dengan kegiatan teknis SKPD di luar Kecamatan, namun perencanaan KUA dan PPAS tetap dilaksanakan oleh Bappeda sebagai SKPD Perencana di Kabupaten Banyumas semua kegiatan SKPD baik dari musrenbang/ masyarakat maupun usulan dari Dinas/ Lemtekda/ Badan/ Kecamatan dan Kelurahan.

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Jatilawang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, namun demikian untuk Kecamatan tidak ada

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja, Kebijakan Nasional yang harus di dukung dan dilaksanakan oleh semua SKPD.

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Kecamatan Jatilawang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai SKPD yang melaksanakan urusan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik harus menetapkan tujuan sehingga Kecamatan Jatilawang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kabupaten Banyumas “**Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik dengan membangun sistem integritas Birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat**” adalah sebagai berikut: ***Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima***

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Jatilawang dalam jangka lima (5) tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka ***sasaran pembangunan*** di Kecamatan Jatilawang adalah sebagai berikut : ***Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat***. Dengan indikator sasarannya meliputi dua hal yaitu : Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu dan Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Jatilawang beserta indikator kinerjanya dapat ditunjukkan dalam tabel berikut :

TUJUAN	SASARAN
<i>Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima</i>	<i>Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat</i>

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor – faktor yang menjadikan bahan pertimbangan SKPD kami dalam merumuskan program dan kegiatan, adalah disamping untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi SKPD juga ada pertimbangan lain seperti :

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - b. Pencapaian SDGs,
 - c. Pengentasan kemiskinan,
 - d. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
- a. Dengan adanya pertimbangan – pertimbangan melalui desk rancangan awal RKPD 2022, kami telah menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja tahun 2022 sebagai berikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 Pagu : Rp. **2.786.865.400**
Kegiatan :
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Pagu Anggaran : Rp. 5.014.000
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Pagu Anggaran : Rp. 2.137.158.000
 - c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Pagu Anggaran : Rp. 156.299.000
 - d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Pagu Anggaran : Rp. 85.894.000
 - e) Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Pagu Anggaran : Rp. 294.825.400
 - f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Pagu Anggaran : Rp. 107.675.000
 2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik
 Pagu : **Rp. 17.544.600**
Kegiatan :
 Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
 Pagu Anggaran : Rp. 17.544.600
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 Pagu : **Rp. 46.300.000**
Kegiatan :
 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 Pagu Anggaran : Rp. 46.300.000
 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pagu : **Rp. 7.125.000**

Kegiatan :

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pagu Anggaran : Rp. 7.125.000

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Pagu : **Rp. 7.526.000**

Kegiatan :

Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Pagu Anggaran : Rp. 7.526.000

Kecamatan Jatilawang mempunyai 5 program dan 10 kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lima kepala seksi dan sekretariat. Berikut merupakan total kebutuhan dana tahun 2022 yaitu Rp 2.865.361.000,00 dengan sumber pendanaan APBD Kab sebesar Rp 2.865.361.000,00.

Berikut lampiran rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023 pada table T-C.33:

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD
KECAMATAN JATILAWANG
Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Banyumas

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kegiatan/ Indikator SubKegiatan	Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Tahun 2023		Catatan Penting
		Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana			Total	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
				APBD Kab	APBD Prov	APBN				
KECAMATAN JATILAWANG				0	0					
KECAMATAN JATILAWANG				0	0					
Unsur Kewilayahan				2.865.361.000	0	0		2.889.307.000		
Kecamatan				2.865.361.000	0	0	2.865.361.000	2.889.307.000		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	2.786.865.400	0	0	2.786.865.400	100	2.783.929.000	
Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	2.507.000	0	0	2.507.000	5 Dokumen	5.056.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	2	5.250.000	0	0	5.250.000	2 Dokumen	2.528.000	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	2	2.507.000	0	0	2.507.000	2 Dokumen	2.528.000	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	12	2.137.158.000	0	0	2.137.158.000		2.155.136.000	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	16	2.104.758.000	0	0	2.104.758.000	16 Orang	2.122.348.000	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pengelola Keuangan SKPD	Orang	12	32.400.000	0	0	32.400.000	12 Orang	32.788.000	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Yang Dikelola	Jenis	5	156.299.000	0	0	156.299.000	5 Jenis	157.688.000	0

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jenis	5	5.012.000	0	0	5.012.000	5 Jenis	5.054.000	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	1	36.386.000	0	0	36.386.000	1 Jenis	36.690.000	0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	3	8.028.000	0	0	8.028.000	3 Jenis	8.095.000	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	2	17.924.000	0	0	17.924.000	2 Bulan	18.073.000	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	2	6.309.000	0	0	6.309.000	2 Buah	6.362.000	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi / konsultasi dan pertemuan tingkat provinsi/pusat yang dilaksanakan	Kali	2	82.640.000	0	0	82.640.000	2 Kali	83.414.000	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	2	85.894.000	0	0	85.894.000	2 Unit	64.901.000	0
Pengadaan Mebel	Jumlah meubelir kantor yang tersedia	Unit	5	42.746.000	0	0	42.746.000	5 Unit	17.076.000	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang tersedia	Jenis	3	14.000.000	0	0	14.000.000	3 Jenis	18.328.000	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	5	29.148.000	0	0	29.148.000	5 Unit	29.497.000	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	4	294.825.400	0	0	294.825.400	4 Jenis	292.084.000	0
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dikelola	Bulan	5	40.747.000	0	0	40.747.000	5 Bulan	41.088.000	0
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	Jenis	27	6.750.000	0	0	6.750.000	27 Jenis	6.830.000	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai non ASN	Orang	10	247.328.400	0	0	247.328.400	10 Orang	244.166.000	0

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang/gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	20	107.675.000	0	0	107.675.000	20 Jenis	109.064.000	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional SKPD yang dipelihara	Unit	10	77.600.000	0	0	77.600.000	10 Unit	78.124.000	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharannya peralatan dan mesin lainnya	Unit	5	19.500.000	0	0	19.500.000	5 Unit	20.239.000	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	Unit	5	10.575.000	0	0	19.500.000	5 Unit	10.701.000	0
Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase pemohon pelayanan di kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	17.544.600	0	0	17.544.600	100 %	17.708.000	0
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Jenis Pelayanan di Kecamatan Jatilawang	Jenis Kegiatan	1 Jenis 2 Kegiatan	17.544.600	0	0	17.544.600	1 Jenis 2 Kegiatan	17.708.000	0
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Pemohon pelayanan kecamatan yang terlayani	Orang	7.600	10.035.000	0	0	10.035.000	7.600 Orang	10.119.000	0
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Desa/Kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar	Desa	11	7.509.600	0	0	7.509.600	11 Desa	7.589.000	0
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%	100	46.300.000	0	0	46.300.000	100%	46.687.000	0
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Desa	11	46.300.000	0	0	46.300.000	11 Desa	46.687.000	0
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Orang	100	8.028.000	0	0	8.028.000	100 Orang	8.095.000	0
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat	Kali	150	23.082.000	0	0	23.082.000	150 Kali	23.275.000	0

Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan	100	15.190.000	0	0	15.190.000	100 Kegiatan	15.317.000	0
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan Jatilawang	%	100	7.125.000	0	0	7.125.000	100%	7.083.000	0
Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan pembinaan linmas	Unsur	3	7.125.000			7.125.000	3 Unsur	7.083.000	0
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	%	100	7.526.000			7.526.000	100 %	33.900.000	0
Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan APBDes	Desa	11	7.526.000			7.526.000	11 Desa	33.900.000	0
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Frekuensi Pembinaan dan Pengawasan APBDes	Kali	3	7.526.000			7.526.000	3 Kali	7.589.000	0
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Frekuensi Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kali	0	0			0	0 Kali	26.311.000	
TOTAL							2.865.361.000		2.889.307.000	

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Kecamatan Jatilawang adalah **Program Tahunan** Kecamatan Jatilawang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Kecamatan Jatilawang.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jatilawang selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Jatilawang. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Jatilawang. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Jatilawang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.